

## Pekerja Sektor Informal Sebagai Determinan Jebakan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur

*Informal Sector Workers as a Determinant of the Poverty  
Trap in East Nusa Tenggara*

M. E. Perseveranda<sup>1</sup>

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira, Kota Kupang, Indonesia<sup>1</sup>

Email : [perseverandaerse@gmail.com](mailto:perseverandaerse@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstract**

This study aims to analyse the effect of the number of informal sector workers and informal sector workers' wages on the poverty rate in East Nusa Tenggara (NTT) Province. The method used is a quantitative approach with multiple linear regression analysis, using secondary data for 2023 from the Central Statistics Agency (BPS). The results show that the number of informal sector workers has a positive and significant effect on poverty, indicating that the more people who work in the informal sector, the higher the poverty rate. This reflects the condition of the 'poverty trap' where informal workers tend to have low, irregular incomes and no social security. Meanwhile, the wage variable for informal sector workers shows a negative but insignificant effect on poverty. This means that wage increases have not been able to significantly reduce the poverty rate without an increase in productivity and social protection. Therefore, policy interventions through skills training, access to capital, legalisation of micro-enterprises, and social security for informal sector workers are needed to effectively reduce poverty in NTT.

**Keywords:** Informal Sector Workers; Informal Sector Wages; Poverty Trap; NTT

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah pekerja sektor informal dan upah pekerja sektor informal terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Metode yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif dengan model analisis regresi linier berganda, dengan data sekunder pada tahun 2023 bersumber dari Badan Pusat Statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah pekerja sektor informal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, mengindikasikan bahwa semakin banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal, semakin tinggi tingkat kemiskinan yang terjadi. Hal ini mencerminkan kondisi "jebakan kemiskinan" di mana pekerja informal cenderung berpendapatan rendah, tidak tetap, dan tanpa jaminan sosial. Sementara itu, variabel upah pekerja sektor informal menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, kenaikan upah belum mampu secara nyata menurunkan tingkat kemiskinan tanpa adanya peningkatan produktivitas dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, legalisasi usaha mikro, serta jaminan sosial bagi pekerja sektor informal untuk secara efektif menekan angka kemiskinan di NTT.

**Kata Kunci:** Pekerja Sektor Informal; Upah Sektor Informal; Jebakan kemiskinan; NTT

## Pendahuluan

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang dihadapi oleh hampir seluruh negara, terlebih pada negara sedang berkembang. Dilihat dari kemampuan masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, sumber pendapatan yang kecil, serta tidak memiliki sarana dan juga prasarana dasar yang memadai, seperti perumahan yang layak, buruknya kualitas lingkungan, dan tidak layak untuk dihuni dapat dikategorikan sebagai kondisi masyarakat miskin. Kondisi kekurangan pangan dan kekurangan aset yang produktif tidak semata-mata menggambarkan kemiskinan secara umum, tetapi juga dalam hal ketimpangan serta terbatasnya partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Karakter yang dapat digunakan dalam mengkarakteristikkan seseorang tergolong dalam kondisi miskin sangat beragam, namun secara umum acuan untuk mengidentifikasi kemiskinan antara lain seperti dari penguasaan tanah, jenis pekerjaan serta tingkat pendapatan, kondisi kehidupan sehari-hari dan hubungan seseorang dengan anggota masyarakat lainnya (Sukesi, 2015).

Jebakan kemiskinan menurut Sachs, (2005), dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu: pertama, seluruh pengasilan seseorang akan habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya, sehingga masyarakat miskin tidak memiliki cukup uang untuk ditabungkan serta untuk keperluan masa depan tidak ada sisa pendapatan yang dapat dialokasikan, akibatnya masyarakat yang tergolong dalam kelompok miskin akan terjebat dalam angka pertumbuhan ekonomi negatif dimana mereka terlalu miskin untuk menabung. Kedua, adanya jebakan berupa demografi, yang mana terkhusus ketika keluarga yang tergolong miskin memiliki banyak anak. Dan ketiga, jebakan kemiskinan terjadi akibat pertumbuhan negatif pada fungsi produksi.

Jebakan kemiskinan juga sangat terkait dengan pekerjaan di sektor informal, yang sering kali menjadi satu-satunya pilihan bagi kelompok masyarakat miskin. Sektor informal mencakup pekerjaan tanpa kontrak resmi, tanpa jaminan sosial, dan dengan pendapatan yang tidak menentu, seperti pedagang kaki lima, buruh harian, dan pekerja rumah tangga. Menurut Fields (2019), pekerja di sektor informal umumnya memiliki keterampilan terbatas dan akses yang minim terhadap modal serta teknologi, sehingga sulit bagi mereka untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Hal ini memperkuat siklus kemiskinan karena pekerja di sektor informal cenderung tidak memiliki kesempatan untuk mengakses pelatihan atau pendidikan yang dapat meningkatkan mobilitas ekonomi mereka.

Chen et al., (2021) menunjukkan bahwa selama krisis ekonomi, pekerja informal sering menjadi kelompok yang paling terdampak karena tidak memiliki akses terhadap tunjangan pengangguran atau asuransi kesehatan. Selain itu, Lewis, (1954) dalam modelnya tentang surplus tenaga kerja menjelaskan bahwa ekonomi negara berkembang cenderung mempertahankan sektor informal yang besar karena kurangnya kesempatan di sektor formal. Akibatnya, tenaga kerja tetap terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah dan produktivitas rendah, sehingga menghambat akumulasi modal dan investasi yang diperlukan untuk keluar dari kemiskinan.

Kemiskinan tetap menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Selama tiga tahun terakhir persentase kemiskinan di

NTT mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 20,05 persen menjadi 19,48 persen pada tahun 2024, jika dibandingkan dengan kemiskinan secara nasional jauh lebih tinggi. Pada tahun 2022 kemiskinan ditingkat nasional sebesar 9,54 persen mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 9,03 persen.

Faktor utama yang memberikan kontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan di NTT salah satunya adalah dominasi sektor informal dalam perekonomian daerah. Pekerja di sektor informal umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial, kepastian kerja, dan penghasilan yang layak, yang dapat memperburuk kondisi kesejahteraan mereka. Data menunjukkan pada tahun 2022 pekerja sektor informal berjumlah 2.193.156 jiwa mengalami penurunan menjadi 2.158.381 jiwa pada tahun 2023.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti hubungan antara sektor informal, upah, dan kemiskinan. Nariswari, (2020) menemukan bahwa pekerja sektor informal di Jawa Timur cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan pekerja formal, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan. Simbolo et al., (2023) juga menunjukkan bahwa upah minimum memiliki dampak signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, meskipun efektivitasnya berbeda antarwilayah. Sementara itu, Mahendra & Juardi, (2024) menemukan bahwa upah minimum yang ditetapkan memberikan peran penting dalam pengurangan kemiskinan di Kota Makassar, sedangkan faktor lain seperti inflasi dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas dampak sektor informal dan upah terhadap kemiskinan di Indonesia, masih terdapat kesenjangan penelitian (theory gap) dalam memahami dinamika tersebut di wilayah NTT. Karakteristik ekonomi dan sosial di NTT yang berbeda dengan wilayah lain, seperti dominasi sektor pertanian subsisten dan terbatasnya akses terhadap pasar tenaga kerja formal, dapat menyebabkan perbedaan dalam mekanisme hubungan antara sektor informal, upah, dan kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris bagaimana pekerja sektor informal dan tingkat upah berkontribusi terhadap kemiskinan di NTT. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini.

Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk menganalisis data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh dari pekerja sektor informal dan tingkat upah pekerja sektor informal terhadap kemiskinan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan akses pekerja sektor informal terhadap pendapatan yang layak dan perlindungan sosial, diharapkan kemiskinan di NTT dapat berkurang secara signifikan dalam jangka panjang.

Sektor informal merupakan bagian penting dalam perekonomian, terutama di negara berkembang, di mana sebagian besar tenaga kerja tidak memiliki akses terhadap pekerjaan formal. Lewis, (1954) dalam teori dualisme ekonomi menjelaskan bahwa sektor informal muncul sebagai

akibat dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan sektor modern dan terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal. Hal ini sejalan dengan pandangan Hart, (1973) yang pertama kali memperkenalkan konsep sektor informal sebagai bentuk aktivitas ekonomi yang tidak terorganisir dan tidak terikat oleh regulasi formal. Menurut Tokman, (1979), pekerja sektor informal sering kali menghadapi kondisi kerja yang rentan, seperti pendapatan yang tidak stabil, minimnya perlindungan sosial, serta keterbatasan akses terhadap modal dan pelatihan, sehingga mereka sulit untuk meningkatkan kesejahteraan.

Nurkse, (1953), dalam teori jebakan kemiskinan yang dikemukakannya menyatakan bahwa masyarakat miskin sering kali terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan akibat rendahnya tingkat investasi dalam modal manusia dan fisik. Dalam konteks sektor informal, pekerja sering kali tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk beralih ke pekerjaan yang lebih produktif, sebagaimana diungkapkan dalam teori modal manusia oleh Becker, (1964). Ketiadaan akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang memadai menyebabkan pekerja sektor informal tetap berada dalam pekerjaan berupah rendah dengan mobilitas ekonomi yang terbatas. Selain itu, menurut Fields, (1990), transisi dari sektor informal ke formal sangat sulit karena adanya hambatan struktural, seperti regulasi ketenagakerjaan dan permodalan yang lebih menguntungkan pekerja di sektor formal.

Keterkaitan antara sektor informal dan jebakan kemiskinan juga dapat dijelaskan melalui pendekatan ekonomi institusional yang dikembangkan oleh North, (1990). Dalam pandangan ini, kurangnya perlindungan hukum dan kelembagaan yang mendukung bagi pekerja sektor informal memperburuk kondisi kerja mereka, menciptakan hambatan dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Chen, (2007) yang menunjukkan bahwa pekerja sektor informal memiliki risiko lebih tinggi terhadap kerentanan ekonomi akibat absennya akses terhadap jaminan sosial dan perlindungan hukum. Dengan demikian, pekerja sektor informal sering kali terjebak dalam kondisi kemiskinan yang sulit dihindari tanpa adanya intervensi kebijakan yang tepat, seperti akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan regulasi yang mendukung transisi ke sektor formal.

Berbagai penelitian empiris telah mengkaji hubungan antara pekerja sektor informal dan jebakan kemiskinan di berbagai negara, terutama di negara berkembang. Studi yang dilakukan oleh Loayza & Rigolini, (2011) menunjukkan bahwa tingginya proporsi pekerja di sektor informal berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan akibat rendahnya produktivitas dan keterbatasan akses terhadap jaminan sosial serta kredit usaha. Penelitiannya menggunakan data panel dari beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa pada pekerja sektor informal cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan pekerja sektor formal, sehingga memperkuat jebakan kemiskinan dalam jangka panjang.

Selain itu, penelitian oleh Günther & Launov, (2012) menyoroti perbedaan dalam karakteristik pekerja sektor informal di berbagai negara. Berdasarkan analisis terhadap data dari negara-negara Afrika dan Amerika Latin, ditemukan bahwa sebagian besar pekerja sektor informal bekerja di kondisi yang rentan, dengan akses yang terbatas terhadap pelatihan dan pengembangan keterampilan. Disimpulkan bahwa sektor informal bukan hanya tempat bagi mereka yang tidak

mampu bersaing di sektor formal, tetapi juga menjadi ruang yang tidak memberikan peluang signifikan untuk mobilitas ekonomi ke sektor formal, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan.

Studi oleh Sibagariang et al., (2023) menemukan bahwa pekerja sektor informal di Indonesia memiliki risiko lebih tinggi untuk tetap berada dalam kemiskinan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor formal. Menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi ekonomi pekerja sektor informal. Mereka juga menekankan bahwa meskipun sektor informal sering kali menjadi alternatif bagi mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, ketidakstabilan pendapatan dan ketiadaan akses terhadap sumber daya produktif menghambat mereka untuk keluar dari kemiskinan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh variabel pekerja sektor informal dan upah pekerja sektor informal terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Pendekatan kuantitatif sengaja dipilih dikarenakan kajian studi ini bertujuan untuk mengukur pengaruh antar variabel menggunakan data numerik dan statistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi Badan Pusat Statistik (BPS), berupa data kemiskinan, pekerja sektor informal dan upah pekerja sektor informal tahun 2023 dari kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dengan mengunduh dataset dari situs web resmi lembaga terkait. Data tersebut kemudian diolah dan disesuaikan agar siap untuk dianalisis :

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh pekerja sektor informal dan upah pekerja sektor informal terhadap kemiskinan di Nusa tenggara Timur. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_3 + \epsilon \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

Dimana:

- Y : variabel dependen kemiskinan di Nusa Tenggara Timur,
- X<sub>1</sub> : variabel independen pekerja sektor informal,
- X<sub>2</sub> : variabel independen upah pekerja sektor informal,
- b<sub>0</sub> : konstanta,
- b<sub>1,b2</sub> : koefisien regresi,
- ε : error term.

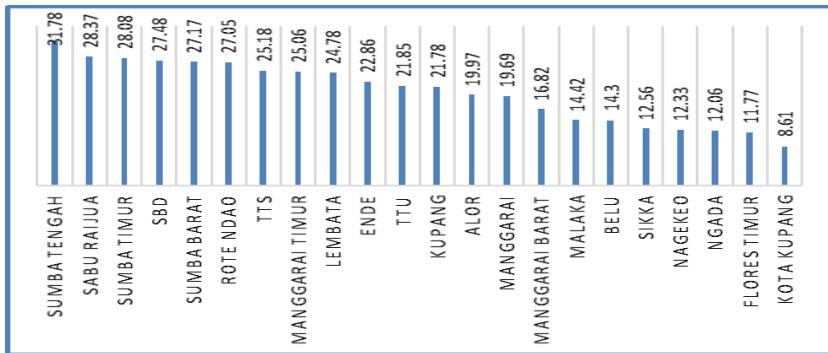
Uji statistik yang dilakukan meliputi uji t untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara parsial, dan uji F untuk menguji signifikansi model secara keseluruhan. Selain itu, uji asumsi klasik seperti uji normalitas, linieritas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi juga dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi syarat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

## Pembahasan

Tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana Sumba Tengah memiliki tingkat kemiskinan tertinggi (31,78%), sementara Kota Kupang memiliki tingkat kemiskinan terendah (8,61%). Perbedaan ini dapat dikaitkan dengan struktur ekonomi di masing-masing wilayah, terutama dalam kaitannya dengan sektor informal. Di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti Sumba Tengah, Sabu Raijua, dan Sumba Timur, sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal, termasuk pertanian subsisten, perdagangan kecil, dan pekerjaan tanpa jaminan sosial. Sektor ini umumnya memiliki pendapatan yang tidak stabil dan akses terbatas terhadap fasilitas keuangan, sehingga masyarakatnya lebih rentan terhadap kemiskinan.

Kota Kupang yang memiliki tingkat kemiskinan terendah, menawarkan lebih banyak peluang kerja di sektor formal, seperti perdagangan, jasa, dan pemerintahan. Akses ke pendidikan dan pelatihan keterampilan di perkotaan juga lebih baik, memungkinkan penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan lebih stabil. Meskipun sektor informal tetap menjadi bagian penting dari perekonomian di seluruh NTT, tingginya tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten menunjukkan perlunya kebijakan yang mendukung pekerja informal, seperti akses ke pembiayaan usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan perlindungan sosial, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Rincian mengenai tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten/kota di Nusa tenggara Timur disajikan dalam gambar berikut.

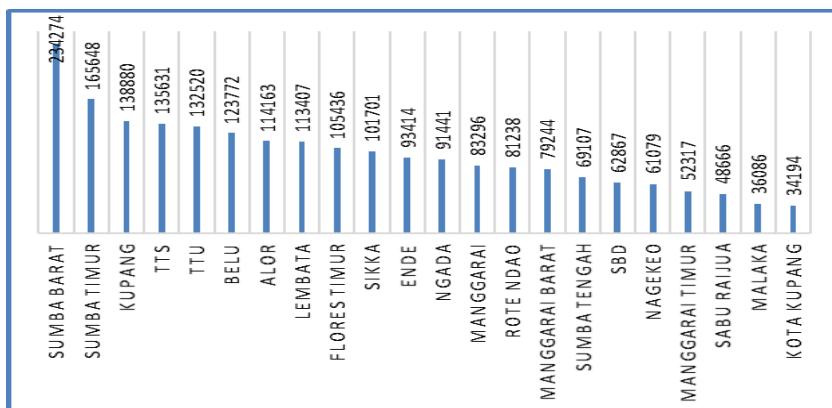
Kandungan gizi makro khusus karbohidrat dan protein dari tepung pisang lokal dan tepung kacang hijau *forelakateu* jika dibandingkan dengan SNI memiliki kadar karbohidrat yang lebih tinggi. SNI kadar karbohidrat tepung pisang yakni minimum 30% sedangkan kadar karbohidrat pada tepung kacang hijau sebesar 63%. Selain itu kadar protein pada tepung kacang hijau *forelakateu* nilainya lebih tinggi dari kadar protein yang dipersyaratkan SNI yakni minimum 6%. Berdasarkan hasil analisis kadar protein tepung pisang dan kadar lemak tepung pisang dan tepung kacang hijau memiliki nilai yang rendah. Hal ini dikarenakan penggunaan suhu saat proses pengeringan menggunakan oven yang kurang tepat dan penggunaan garam jenuh yang berlebihan.



Sumber: Hasil olahan data sekunder, 2025

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

Kabupaten dengan jumlah pekerja sektor informal tertinggi, seperti Sumba Barat (254.274), Sumba Timur (165.648), dan Kupang (138.880), memiliki keterbatasan dalam penyediaan lapangan kerja formal, sehingga mendorong masyarakat untuk mencari nafkah di sektor informal. Hal ini bisa terjadi karena minimnya industri manufaktur, rendahnya investasi sektor swasta, atau terbatasnya program ketenagakerjaan di daerah tersebut



Sumber: Hasil olahan data sekunder, 2025

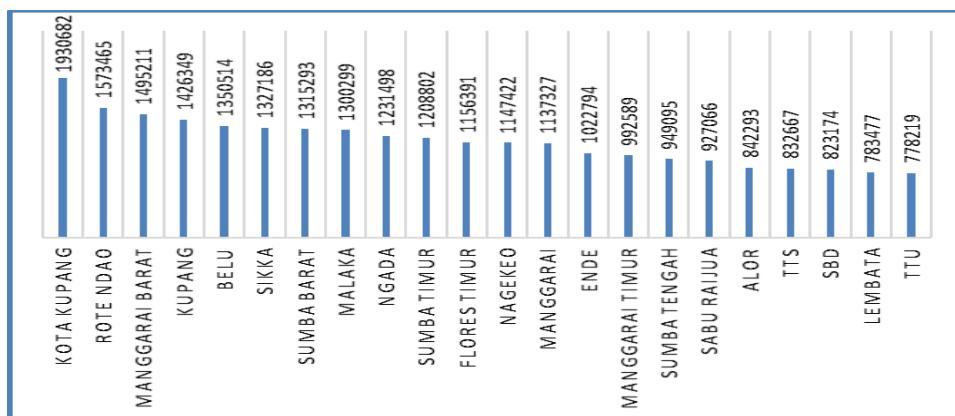
Gambar 2. Jumlah Pekerja Sektor Informal pada Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

Sebaliknya, daerah dengan jumlah pekerja sektor informal yang lebih rendah, seperti Kota Kupang (34.194) dan Malaka (38.066), mungkin memiliki lebih banyak peluang kerja formal, terutama di sektor jasa, pemerintahan, dan perdagangan, yang dapat menyerap tenaga kerja dengan lebih baik. Kota Kupang, sebagai ibu kota provinsi, memiliki akses yang lebih luas terhadap sektor

formal, seperti pemerintahan, pendidikan, dan jasa keuangan, perdagangan sehingga mengurangi ketergantungan pada sektor informal. Pengembangan sektor informal di NTT menjadi penting mengingat sektor ini berperan sebagai jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat, terutama di daerah dengan lapangan kerja formal yang terbatas. Pemerintah daerah dapat mendorong penguatan sektor informal melalui program pelatihan keterampilan, akses permodalan, serta regulasi yang mendukung usaha kecil dan mikro, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gambar 2. mencerminkan distribusi jumlah pekerja sektor informal di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja formal serta perkembangan sektor informal di masing-masing daerah. Hidayah et.al (2022) menjelaskan bahwa Faktor penting yang memungkinkan suatu daerah untuk keluar dari kemiskinan adalah pengaktifan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kota Kupang memiliki jumlah upah tertinggi Rp.1.930.682,- diikuti oleh Rote Ndao dan Manggarai Barat dengan angka masing-masing Rp.1.573.465,- dan Rp.1.452.341,-. Sementara itu, beberapa kabupaten dengan upah lebih rendah mencakup Lembata Rp.783.477,- dan Timor Tengah Utara (TTU) Rp.778.219,-. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat perkembangan ekonomi, sektor industri dominan, serta akses terhadap pasar dan infrastruktur. Kota Kupang sebagai pusat ekonomi NTT cenderung memiliki tingkat upah yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain yang lebih terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di sektor informal masih belum merata di seluruh wilayah NTT.

Ketimpangan upah di sektor informal ini berpotensi berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan di berbagai daerah di NTT. Daerah dengan upah rendah, seperti Lembata dan TTU, kemungkinan memiliki daya beli masyarakat yang lebih rendah, sehingga akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan menjadi lebih terbatas. Selain itu, pekerja sektor informal umumnya tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai, sehingga mereka lebih rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga barang atau bencana alam.



Sumber: Hasil olahan data sekunder, 2025

Gambar 3. Upah Pekerja Sektor Informal pada Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2023

Ketimpangan ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor informal, baik melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, maupun penguatan sektor ekonomi lokal agar dapat menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih layak dan berkelanjutan. Gambar.3 menunjukkan jumlah rata-rata upah pekerja sektor informal di berbagai kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh pekerja sektor informal dan upah tenaga kerja sektor informal terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Untuk memperoleh hasil dari persamaan regresi, data diolah menggunakan Eviews 10. Hasil olahan data disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.55759	16.81729	0.865632	0.3975
X1	0.000476	7.44E-05	6.400913	0.0000
X2	-8.09E-06	1.18E-05	-0.688246	0.4996
<i>R-squared</i>	0.698445	<i>Mean dependent var</i>		51.86909
<i>Adjusted R-squared</i>	0.666702	<i>S.D. dependent var</i>		27.10003
<i>S.E. of regression</i>	15.64538	<i>Akaike info criterion</i>		8.464352
<i>Sum squared resid</i>	4650.779	<i>Schwarz criterion</i>		8.613130
<i>Log likelihood</i>	-90.10787	<i>Hannan-Quinn criter.</i>		8.499400
<i>F-statistic</i>	22.00335	<i>Durbin-Watson stat</i>		1.970627
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000011			

Berdasarkan hasil olahan data, maka persamaan regresi linier berganda pengaruh dari pekerja sektor informal dan upah pekerja sektor informal terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Timur dapat dirumuskan sebagai berikut:

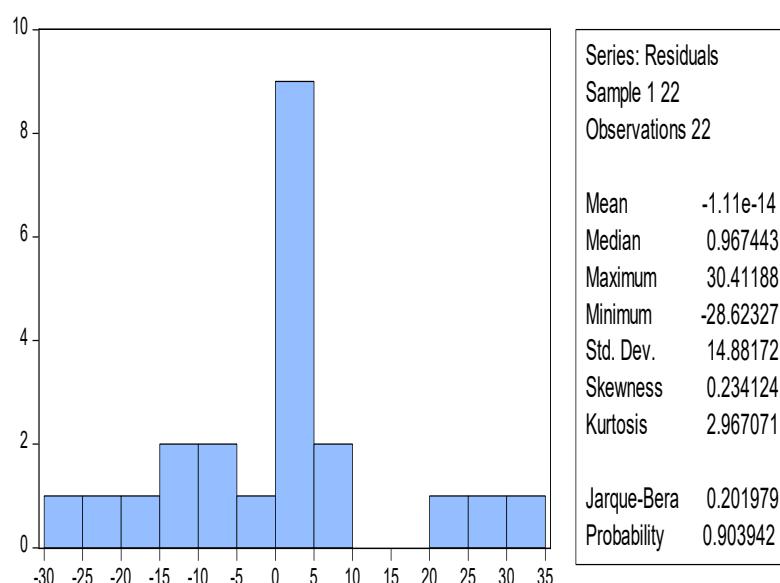
$$Y = 14.55759 + 0.00047X1 - 8.09E-06X2$$

Persamaan ini dapat diinterpretasikan bahwa pekerja sektor informal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Koefisien regresi sebesar 14.55759 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan pekerja sektor informal sebesar 1% maka hal tersebut akan meningkatkan kemiskinan sebesar 14.55759 % ceteris paribus. Atau jika terjadi penurunan pekerja sektor informal akan menurunkan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Upah pekerja sektor informal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Timur oleh Negara Timor Leste. Koefisien regresi sebesar - 8.09E-06

menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan upah pekerja sektor informal sebesar 1% maka hal tersebut akan menurunkan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur sebesar -8.09E-06% ceteris paribus.

Pengujian pengaruh secara parsial digunakan uji-t dengan tingkat signifikansi 5%, variabel pekerja sektor informal berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, ditunjukkan oleh prob. koefisien regresi variabel pekerja sektor informal  $0.0000 < 0,05$ . Sedangkan pvariabel upah pekerja sektor informal tidak berpengaruh signifikan ditunjukkan oleh prob. koefisien regresi  $0.4996 > 0.05$ . Pengujian pengaruh secara simultan digunakan uji-F dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil uji-F variabel pekerja sektor informal dan upah pekerja sektor informal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Timur ditunjukkan oleh nilai prob.  $0.000011 < 0.05$ . Adjusted R-squared sebesar 0.666702 berarti sekitar 66,67% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model regresi tersebut, setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. 33,33% sisanya dari variasi dalam variabel dependen tidak dijelaskan oleh model ini, hal ini menunjukkan adanya faktor-faktor lain dari luar variabel-variabel independen yang tidak digunakan juga mempengaruhi variabel dependen.

Untuk mengetahui apakah residual dalam penelitian ini terdistribusi secara normal atau tidaknya, yaitu dengan melihat perbandingan dimana jika nilai Jarque Bera (JB) dengan nilai dari tabel X2, di mana: a) Jika nilai probabilitas  $JB > \alpha = 0,05$ , maka dapat dikatakan nilai residual dari datanya terdistribusi secara normal; b) Jika nilai probabilitas  $JB < \alpha = 0,05$ , maka nilai residual dari datanya dapat dikatakan terdistribusi secara tidak normal. Berdasarkan hasil analisis output yang di dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Jarque Bera (JB) sebesar  $0,9039 > 0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa nilai residual dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.



Gambar 4. Output Uji Normalitas

Persamaan ini dapat diinterpretasikan bahwa pekerja sektor informal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Koefisien regresi sebesar 14.55759 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan pekerja sektor informal sebesar 1% maka hal tersebut akan meningkatkan kemiskinan sebesar 14.55759 % ceteris paribus. Atau jika terjadi penurunan pekerja sektor informal akan menurunkan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Upah pekerja sektor informal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Timur oleh Negara Timor Leste. Koefisien regresi sebesar - 8.09E-06 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan upah pekerja sektor informal sebesar 1% maka hal tersebut akan menurunkan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur sebesar -8.09E-06% ceteris paribus.

Tabel 2. Hasil Uji Linieritas Menggunakan Ramsey RESET Test

	Value	df	Probability
t-statistic	0.658791	18	0.5184
F-statistic	0.434005	(1, 18)	0.5184
Likelihood ratio	0.524157	1	0.4691

Lebih lanjut lagi, untuk mengetahui apakah model yang digunakan berbentuk linear atau tidak adalah dengan cara membandingkan nilai dari F statistik dengan nilai F tabel (atau dengan cara lainnya yaitu membandingkan nilai probabilitasnya), yaitu a. Jika nilai probabilitas F statistik  $> 0,05$ , maka hipotesis yang menyatakan bahwa model linear dalam penelitian ini diterima. b. Jika probabilitas F statistik  $< 0,05$ , maka hipotesis yang menyatakan bahwa model linear dalam penelitian ini ditolak. Hasil output yang didapat dari analisis data dalam penelitian ini menunjukkan nilai probabilitas F statistik sebesar  $0,5184 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan hipotesis yang menyatakan bahwa model linear adalah diterima.

Tabel 3. Hasil Uji Otokoresi menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

F-statistic	0.001323	Prob. F(2,17)	0.9987
Obs*R-squared	0.003423	Prob. Chi-Square(2)	0.9983

Sumber: Hasil Olahan data Sekunder Menggunakan Eviews 10

Untuk mengetahui ada tidaknya serial korelasi dalam penelitian ini, maka akan mensandingkan nilai dari X2 hitung dengan nilai tabel X2 (nilai probabilitasnya), yang mana: a.) Jika didapat nilai probabilitas dari F statistik  $> \alpha = 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah adanya serial korelasi yang akan

diterima. b.) Jika didapat nilai probabilitas dari F statistik  $< \alpha = 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah adanya serial korelasi yang akan ditolak. Hasil yang didapat dari analisis data dalam kajian ini mendapatkan nilai probabilitas F statistik sebesar  $0,9987 > 0,05$ , oleh karenanya model yang digunakan dalam kajian ini terbebas dari masalah serial korelasi.

Berikut adalah kaidah keputusan untuk uji multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel independen dimana jika nilai VIF  $< 10$ , dapat disimpulkan bahwa tidak adanya masalah multikolinearitas yang signifikan yaitu kondisi di mana variabel bebas tidak saling berkorelasi kuat. Jika nilai VIF  $\geq 10$ , maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah multikolinearitas yang tinggi yaitu kondisi di mana variabel bebas berkorelasi kuat, sehingga dapat menyebabkan masalah dalam estimasi model regresi. Berdasarkan nilai VIF pada tabel, diketahui bahwa tidak adanya indikasi multikolinearitas yang signifikan pada variabel-variabel independen dalam model ini yang dibentuk dalam penelitian ini. Hal ini dilihat dari keseluruhan variabel independen yang memiliki nilai VIF yang berada di bawah 10, yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang serius dalam model regresi ini.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient Variance</i>	<i>Uncentered VIF</i>	<i>Centered VIF</i>
C	282.8213	25.41925	NA
X1	5.53E-09	5.812164	1.026642
X2	1.38E-10	17.77592	1.026642

Sumber: Hasil Olahan data Sekunder Menggunakan Eviews 10

Apabila nilai  $X^2$  hitung (nilai Obs\* R squared)  $>$  nilai  $X^2$ tabel, dengan besarnya nilai derajat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  $\alpha = 5\%$ , baik untuk cross terms maupun pada no cross terms oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini lolos dalam uji heteroskedastisitas. Hasil analisis output yang didapat, berdasarkan tabel output di atas, diketahui bahwa nilai Obs\* R squared sebesar 3.99, dengan nilai probabilitas  $X^2$  adalah  $0.5499 > 0,05$  maka, dapat dikatakan bahwa model terhindar dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan *Test White*

<i>F-statistic</i>	0.710351	<i>Prob. F(5,16)</i>	0.6244
<i>Obs*R-squared</i>	3.996501	<i>Prob. Chi-Square(5)</i>	0.5499
<i>Scaled explained SS</i>	2.931783	<i>Prob. Chi-Square(5)</i>	0.7105

Sumber: Hasil Olahan data Sekunder Menggunakan Eviews 10

Sektor informal merupakan bagian dari perekonomian yang mencakup aktivitas ekonomi di luar regulasi dan perlindungan hukum formal, yang biasanya dilakukan oleh individu atau usaha kecil tanpa pencatatan resmi. Konsep sektor informal pertama kali diperkenalkan oleh Hart, (1973) dalam kajiannya mengenai perekonomian di Ghana. Hart, (1973) membedakan antara pekerja sektor formal yang memiliki perlindungan hukum dan sosial serta pekerja sektor informal yang bekerja dalam kondisi tidak terstruktur tanpa kepastian hukum dan kesejahteraan. Sementara itu, Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) dalam laporan tahun 1972 juga memberikan definisi sektor informal sebagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok usaha kecil yang tidak tercakup dalam peraturan ketenagakerjaan dan perpajakan formal (ILO, 1973).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja sektor informal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti peningkatan jumlah pekerja di sektor ini berkorelasi dengan meningkatnya tingkat kemiskinan. Jebakan kemiskinan (*poverty trap*) terjadi ketika individu atau kelompok masyarakat terperangkap dalam kondisi ekonomi yang sulit dan memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pekerja sektor informal umumnya memiliki pendapatan rendah, tidak stabil, serta minim perlindungan sosial, sehingga mereka sulit untuk meningkatkan kualitas hidup atau beralih ke sektor formal yang lebih menjanjikan. Akibatnya, mereka tetap berada dalam siklus kemiskinan tanpa peluang signifikan untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Rendahnya investasi dalam pendidikan dan keterampilan, keterbatasan akses terhadap modal usaha, serta lemahnya perlindungan tenaga kerja semakin memperparah situasi ini, menyebabkan sektor informal terus berkembang sebagai pilihan utama bagi kelompok miskin, namun tanpa memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih baik.

Temuan ini sejalan dengan teori Lewis, (1954) tentang ekonomi dualisme, di mana sektor informal sering kali menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal akibat keterbatasan lapangan pekerjaan. Pekerja sektor informal cenderung memiliki pendapatan rendah, tidak tetap, serta minim perlindungan sosial, yang membuat mereka rentan terhadap kemiskinan (Fields, 1990). Selain itu, Todaro & Smith, (2020) menjelaskan bahwa urbanisasi yang tidak seimbang menyebabkan pertumbuhan sektor informal yang pesat tanpa diiringi peningkatan kesejahteraan yang signifikan, sehingga memperburuk kondisi kemiskinan.

Penelitian ini juga didukung oleh beberapa studi sebelumnya. Penelitian Bacchetta et al., (2009) menemukan bahwa di negara berkembang, tingginya proporsi tenaga kerja di sektor informal sering dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi karena rendahnya produktivitas dan keterbatasan akses terhadap fasilitas keuangan. Selain itu, studi dari Günther & Launov, (2012) menegaskan bahwa meskipun sektor informal dapat menjadi strategi bertahan hidup bagi kelompok masyarakat miskin, tetapi saja karakteristik pekerjaan yang tidak stabil dan pendapatan yang rendah membuat pekerja di sektor ini sulit keluar dari jerat kemiskinan. Oleh karena itu, intervensi kebijakan diperlukan untuk meningkatkan kondisi kerja sektor informal, seperti peningkatan akses terhadap pelatihan keterampilan, legalisasi usaha mikro, serta

perlindungan sosial bagi pekerja informal guna mengurangi dampak negatifnya terhadap kemiskinan.

Taufiq & Dartanto, (2020) menemukan bahwa pekerja di sektor informal cenderung memiliki mobilitas pendapatan yang rendah, yang mengakibatkan mereka terjebak dalam siklus kemiskinan. Meskipun sektor informal berperan dalam menyediakan pekerjaan bagi masyarakat miskin dan kurang berpendidikan, tantangan utama yang dihadapi pekerja sektor ini adalah kurangnya jaminan sosial, ketidakstabilan pendapatan, serta keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi (Williams & Nadin, 2012). Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja di sektor informal, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta perluasan jaminan sosial.

Upah dalam sektor informal membahas mekanisme penentuan upah bagi pekerja yang tidak terikat dalam struktur formal perusahaan atau organisasi. Sukirno (2002) menyatakan bahwa upah merupakan suatu imbalan jasa yang akan diterima seseorang dalam hubungan kerja yang dapat berupa uang atau barang, melalui suatu perjanjian kerja, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri dan keluarga seseorang. Dalam konteks sektor informal, penentuan upah seringkali tidak mengikuti standar formal dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan lapangan kerja, keterampilan pekerja, serta dinamika penawaran dan permintaan tenaga kerja. Lebih lanjut, teori segmentasi pasar tenaga kerja dari Fields, (1990) menyoroti bahwa perbedaan upah antara sektor formal dan informal tidak hanya disebabkan oleh perbedaan produktivitas, tetapi juga oleh faktor institusional seperti regulasi pemerintah, keberadaan serikat pekerja, dan akses terhadap modal atau jaringan sosial. Dalam banyak kasus, pekerja di sektor informal menerima upah lebih rendah bukan karena kurang produktif, tetapi karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup atau akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan daya tawar mereka dalam negosiasi upah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah pekerja sektor informal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan mengindikasikan bahwa peningkatan upah di sektor ini tidak secara langsung berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep jebakan kemiskinan (*poverty trap*), di mana pekerja sektor informal tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rentan meskipun mengalami kenaikan upah. Salah satu faktor utama adalah rendahnya produktivitas dan keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi yang lebih baik. Upah yang meningkat di sektor informal sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar atau meningkatkan daya beli secara signifikan, terutama karena tidak diiringi dengan peningkatan keterampilan, akses terhadap pendidikan, serta perlindungan sosial yang memadai. Selain itu, sifat pekerjaan di sektor informal yang tidak stabil dan minimnya akses terhadap layanan keuangan membuat pekerja sulit untuk menabung atau berinvestasi dalam modal yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Akibatnya, meskipun upah naik, para pekerja tetap terjebak dalam siklus kemiskinan tanpa adanya mobilitas ekonomi yang nyata.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori Lewis, (1954) tentang ekonomi dualisme, yang menyatakan bahwa sektor informal sering kali menjadi penampung tenaga kerja surplus dari sektor

formal dengan produktivitas rendah dan pendapatan yang tidak stabil. Meskipun terjadi peningkatan upah, besaran kenaikannya mungkin tidak cukup signifikan untuk mengangkat pekerja keluar dari garis kemiskinan, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Studi oleh Nariswari, (2020) menemukan bahwa pekerja di sektor informal cenderung memiliki pendapatan yang rendah, sehingga mereka tetap dekat dengan garis kemiskinan meskipun terjadi peningkatan upah. Hal ini dikarenakan oleh rendahnya tingkat produktivitas dan pendidikan di kalangan pekerja sektor informal. Selain itu, penelitian oleh Pamungkas (2017) menjelaskan bahwa meskipun peningkatan upah minimum dapat meningkatkan rata-rata upah pekerja, hal ini tidak serta merta menurunkan tingkat kemiskinan karena dampak negatifnya terhadap tingkat pengangguran. Dengan demikian, meskipun upah di sektor informal meningkat, tanpa disertai peningkatan produktivitas dan akses ke peluang ekonomi yang lebih baik, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan tetap minimal.

Penelitian sebelumnya yang mendukung temuan bahwa upah pekerja sektor informal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan berupa studi oleh Günther & Launov, (2012) menemukan bahwa meskipun sektor informal dapat berfungsi sebagai mekanisme bertahan hidup bagi individu yang tidak dapat mengakses pekerjaan di sektor formal, pendapatan yang diperoleh seringkali tidak cukup untuk secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas dan kurangnya akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan. Selain itu, penelitian oleh Maloney, (2004) menunjukkan bahwa banyak pekerja di sektor informal memilih untuk tetap berada di sektor tersebut karena fleksibilitas dan otonomi yang ditawarkan, meskipun dengan konsekuensi pendapatan yang lebih rendah dan ketidakstabilan ekonomi yang lebih tinggi. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa peningkatan upah di sektor informal saja tidak cukup untuk secara signifikan mengurangi kemiskinan tanpa disertai dengan upaya peningkatan produktivitas dan akses ke sumber daya yang lebih baik.

## Simpulan

Pekerja sektor informal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Peningkatan jumlah pekerja di sektor ini berhubungan dengan meningkatnya tingkat kemiskinan karena pendapatan yang rendah, ketidakstabilan kerja, serta minimnya perlindungan sosial. Oleh karena itu, intervensi kebijakan diperlukan untuk meningkatkan kondisi kerja sektor informal, termasuk melalui akses terhadap pelatihan keterampilan, legalisasi usaha mikro, serta perlindungan sosial bagi pekerja informal.

Upah pekerja sektor informal ditemukan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, mengindikasikan bahwa kenaikan upah di sektor ini tidak secara langsung berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Hal ini dapat dijelaskan oleh rendahnya tingkat produktivitas dan keterbatasan akses pekerja sektor informal terhadap peluang ekonomi yang lebih baik. Meskipun upah meningkat, besaran kenaikannya mungkin tidak cukup untuk mengangkat pekerja keluar dari garis kemiskinan, terutama jika dibandingkan dengan peningkatan biaya hidup. Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa tanpa peningkatan produktivitas dan akses terhadap

sumber daya ekonomi, dampak kenaikan upah sektor informal terhadap kemiskinan tetap terbatas. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan upah di sektor informal harus disertai dengan upaya peningkatan keterampilan, akses terhadap modal, serta perlindungan sosial agar dapat memberikan dampak yang lebih efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

## Daftar Pustaka

- Bacchetta, M., Ernst, E., & Bustamante, J. P. (2009). *Globalization and informal jobs in developing countries*. International Labour Organization Geneva. [https://www.wto.org/english/research/booksp\\_e/jobs\\_devel\\_countries\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/research/booksp_e/jobs_devel_countries_e.pdf)
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (Vol. 3). University of Chicago Press Chicago.
- Chen, M. (2007). *Rethinking the Informal Economy: Linkages with the Formal Economy and the Formal Regulatory Environment*. United Nations, Department of Economics and Social Affairs. <https://econpapers.repec.org/RePEc:une:wpaper:46>
- Chen, M., Grapsa, E., Ismail, G., Rogan, M., Valdivia, M., Alfers, L., Harvey, J., Ogando, A. C., Reed, S. O., & Roever, S. (2021). COVID-19 and informal work: Distinct pathways of impact and recovery in 11 cities around the world. *WIEGO: Manchester, UK*. <https://hdl.handle.net/20.500.12413/16769>
- Fields, G. (2019). *Employment and development: How work can lead from and into poverty*. Oxford University Press.
- Fields, G. S. (1990). *Labour market modelling and the urban informal sector: Theory and evidence*. <https://ecommons.cornell.edu/server/api/core/bitstreams/67086a38-fef6-419f-8489-b4cd0db8c227/content>
- Günther, I., & Launov, A. (2012). Informal employment in developing countries: Opportunity or last resort? *Journal of Development Economics*, 97(1), 88–98. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2011.01.001>
- Hart, K. (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. *The Journal of Modern African Studies*, 11(1), 61–89. <https://doi.org/10.1017/S0022278X00008089>
- Hidayah, U., Klau, A. D., & Prima, S. R. (2022). Typology and spatial distributions of rural poverty: Evidence from Trenggalek Regency, Indonesia. *Journal of Socioeconomics and Development*, 5(1), 88. <https://doi.org/10.31328/jsed.v5i1.3256>
- Hill, M. S. (1985). The changing nature of poverty. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 479(1), 31–47. <https://doi.org/10.1177/0002716285479001003>

- ILO. (1973). Employment, incomes and equality: A strategy for increasing productive employment in Kenya: Geneva: ILO, 1972. Pp. xx+ 600.[UK pound] 3.96. *World Development*, 1(6), 78–80.  
<https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:wdevel:v:1:y:1973:i:6:p:78-80>
- Lewis, W. A. (1954). *Economic development with unlimited supplies of labour*.  
<https://la.utexas.edu/users/hcleaver/368/368lewistable.pdf>
- Loayza, N. V, & Rigolini, J. (2011). Informal employment: safety net or growth engine? *World Development*, 39(9), 1503–1515. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.02.003>
- Mahenra, T., & Juardi, J. (2024). Dampak Tingkat Pengangguran, Kesempatan Kerja, Upah Minimum, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Kota Makassar. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 4(1), 58–72. <https://doi.org/10.24252/best.v4i1.47533>
- Maloney, W. F. (2004). Informality revisited. *World Development*, 32(7), 1159–1178.  
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.01.008>
- Nariswari, R. (2020). Analisis Peranan Sektor Informal terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(1), 1–14.  
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6986>
- North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. *Cambridge University*. [http://edu.gber.ge/uploads/files\\_66\\_1.pdf](http://edu.gber.ge/uploads/files_66_1.pdf)
- Nurkse, R. (1953). Problems of capital formation in underdeveloped countries. (*No Title*).
- Sachs, J. (2005). The end of poverty Penguin Books. *New York*.
- Sibagariang, F. A., Mauboy, L. M., Erviana, R., & Kartiasih, F. (2023). Gambaran pekerja informal dan faktor-faktor yang memengaruhinya di Indonesia tahun 2022. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2023(1), 151–160. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1892>
- Simbolo, C. M., Nisa, F., Pinem, H. A., Alwi, H., Purnomo, D., Rinaldi, M., & Rozaini, N. (2023). ANALISIS PENGARUH MODAL MANUSIA DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 213–226.  
<https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.124>
- Sukesi, K. (2015). *Gender dan Kemiskinan di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Taufiq, N., & Dartanto, T. (2020). Education, Informal Turnover and Poverty Dynamics in Indonesia. *International Journal of Economics & Management*, 14(1).  
<https://scholar.ui.ac.id/en/publications/education-informal-turnover-and-poverty-dynamics-in-indonesia>
- Todaro, M. P. ., & Smith, S. C. . (2020). *Economic development*. Pearson.

Tokman, V. E. (1979). An exploration into the nature of informal—formal sector relationships. In *The Urban Informal Sector* (pp. 1065–1075). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-024270-5.50007-7>

Williams, C. C., & Nadin, S. J. (2012). Tackling entrepreneurship in the informal economy: evaluating the policy options. *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*, 1(2), 111–124. <https://doi.org/10.1108/20452101211261408>